

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN AKSESIBILITAS  
LAPORAN KEUANGAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH**

(Studi Empiris Pada OPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu)

**Oleh :**

**Nuria Rahma**

**Pembimbing : Restu Agusti dan Meilda Wiguna**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia*

*Email : [nuriarahma94@gmail.com](mailto:nuriarahma94@gmail.com)*

*The Effect Of Presentation Of Financial Statements Of Accessibility Of  
Financial Statements and Government Internal Control Systems  
On Financial Management Accountability*

**ABSTRACT**

*This study aimed to examine the effect of presentation of financial statements accessibility of financial statements and internal control system of government on accountability of financial management. The sampling in this study were which consists of Head OPD, Head of Finance OPD, and Treasurer Expenditure OPD Indragiri Hulu regency government. The sampling technique used purposive sampling method. Data of this study uses primary data directly through a questionnaire and analyzed using SPSS 21. Technical analysis of the data to test the hypothesis using multiple linear regression analysis approach. Based on the results of the study stated that the presentation of financial statements, accessibility of financial statements and internal control systems of government affect the accountability of financial management. Contributions the influence of financial statement presentation, accessibility of financial report and internal control system of government explain accountability of local financial management in OPD of Indragiri Hulu Regency equal to 83,6%. While the remaining 16.4% influenced by variables not observed in this study.*

*Keywords : presentation of financial statements, accessibility of financial statements, internal control system of government, and accountability.*

**PENDAHULUAN**

Sistem akuntansi sektor publik di Indonesia mulai berkembang pada era reformasi sekarang ini. Perkembangan sistem akuntansi sektor publik di Indonesia didorong oleh tekanan yang

dihadapai pemerintah untuk meningkatkan kinerja organisasi publik dalam mewujudkan *good governance*. Dalam hal ini menuntut pelaksanaan akuntabilitas publik dalam melaksanakan setiap aktivitas kemasyarakatan dan Pemerintahan. Akuntabilitas membawa hasil

sebagai notasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Indikator hasil seperti ekonomi, efisiensi, dan efektivitas harus dapat dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu aspek pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah (Mardiasmo, 2004:176). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang ada pada suatu instansi harus ditata dengan sedemikian rupa agar pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya (PP No. 58 Tahun 2005).

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah

Kabupaten Indragiri Hulu dari tahun 2011 sampai tahun 2015 masih mendapatkan opini wajar dengan pengecualian karena masih banyak terdapat kelemahan dan permasalahan dalam penyajian laporan keuangan.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan menurut beberapa penelitian sebelumnya bisa disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan (Sande, 2013).

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (PP No. 24 Tahun 2005). Penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia dan aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Variabel aksesibilitas laporan keuangan juga merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian ini. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Mulyana, 2006). Menurut Mardiasmo (2009 :161) masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan

informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah daerah, semakin baik akses maka semakin terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Variabel sistem pengendalian intern pemerintah merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut Nurillah (2014), sistem pengendalian intern pemerintah merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya organisasi serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan. Suatu akuntabilitas keuangan tidak akan dapat terwujud dengan baik tanpa adanya pengawasan. Oleh karena itu dipelুকannya sistem pengendalian intern pemerintah agar bisa memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi, pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :1). Apakah penyajian laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?, 2). Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?, 3). Apakah sistem pengendalian intern memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1). Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh penyajian laporan keuangan OPD terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan OPD,
- 2). Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh aksesibilitas laporan keuangan OPD terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan OPD,
- 3). Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan OPD.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Mardiasmo (2004:26) mendefinisikan akuntabilitas sebagai “kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

Indikator-indikator yang digunakan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan (Sande, 2013).

1. Perencanaan adalah rancangan suatu kegiatan yang ingin dicapai untuk menciptakan tujuan
2. Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya agar tercapai suatu tujuan.

3. Pelaporan adalah penyampain informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan.
4. Pertanggungjawaban merupakan pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah.
5. Pengawasan maksudnya aparat pengendalian harus melakukan pengawasan agar tujuan tercapai.

### **Penyajian Laporan Keuangan Daerah**

Faktor utama untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas adalah penyajian laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

Menurut Indra Bastian (2010:297) bahwa laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Tujuan khusus penyajian keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
3. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan

memenuhi kewajiban serta komitmennya.

4. Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang terjadi.
5. Menyediakan informasi mengenai secara keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efesiensi, dan pencapaian tujuan.

Penelitian ini sejalan dengan Sande (2013) yang menyatakan bahwa salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan penyajian laporan keuangan pemerintah secara lengkap dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah.

### **Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah**

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ketempat lainnya kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari satu tempat ketempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Rohman, 2009). Sedangkan yang dimaksud dengan aksesibilitas laporan keuangan adalah kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Mulyana, 2006).

Dalam Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 103, menyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan Daerah merupakan data terbuka yang dapat

diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. Yang berarti pula bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada pihak pengguna secara luas atas laporan keuangannya melalui internet, surat kabar atau media lain (Sumiyati, 2015:34).

### **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal (SPIP), SPI merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.

Menurut Ichlas, Dkk (2014) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi.

### **Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan

menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan, 2011). Penyajian laporan keuangan memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat mengakses proses dari pengawasan keuangan daerah (APBD), dengan adanya hal seperti ini maka akan mendorong anggota dewan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur yang berlaku karena masyarakat sudah memiliki peran dalam melakukan pengawasan keuangan daerah.

Sande (2013) mengatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan semakin semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah serta dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dari uraian diatas maka hipotesis yang dibangun adalah

H1: Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### **Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Aksesabilitas laporan Keuangan merupakan kemampuan untuk memberikan akses bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) untuk mengetahui atau

memperoleh informasi atas laporan keuangan berdasarkan prinsip mudah dan biaya murah.

Sande (2013) mengatakan bahwa akuntabilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penelitian kartika (2015) juga menyimpulkan bahwa semakin baik aksesibilitas laporan keuangan SKPD maka akan semakin baik akuntabilitas laporan keuangan instansi tersebut. Hal ini karena jika suatu OPD membuat laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik maka instansi tersebut memberikan keleluasaan bagi pihak yang ingin mengakses laporan pertanggungjawaban yang dibuatnya.

Dari uraian diatas maka hipotesis yang dibangun adalah  
H2 : Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### **Pengaruh Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan tertentu ( Kartika, 2015). Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan atau *fraud* (Afriyanti, 2011).

Iclas, Dkk (2014) mengatakan bahwa sistem

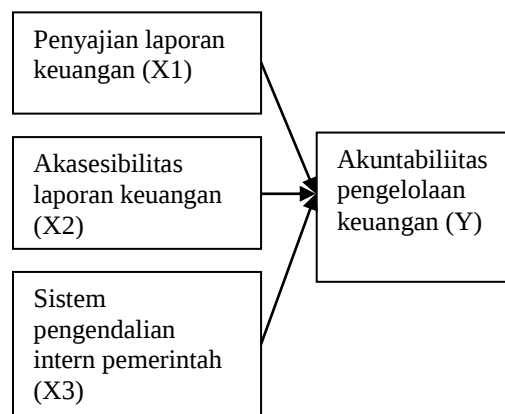
pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan keuangan pemerintah daerah. Selain itu hasil penelitian Primayani, Dkk (2014) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dapat terwujud apabila setiap instansi menerapkan sistem pengendalian intern yang tepat, karena dalam sistem pengendalian intern, suatu instansi diharuskan menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari uraian diatas maka hipotesis yang dibangun adalah  
H3: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### **Model Penelitian**

**Gambar 1**  
**Model Penelitian**



### **METODOLOGI PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada pemerintah Kabupaten

Indragiri Hulu. Populasi dari penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimana teknik pengambilan sampel atas responden menggunakan teknik *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampling berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik dijadikan sampel penelitian.

Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala OPD, Kasubag Keuangan, dan Bendahara Pengeluaran pada 25 OPD Kabupaten Indragiri Hulu. Maka jumlah responden pada penelitian ini adalah 75 orang, yaitu 25 OPD Kabupaten Indragiri Hulu dikalikan 3 orang yang menjadi responden disetiap OPD.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuisisioner. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber ahli.

Prosedur pengumpulan data menggunakan pengumpulan data primer, yaitu kuesioner. Kuesioner yang telah terstruktur dibagi secara langsung kepada responden untuk diisi. Seluruh kuesioner terdiri dari 75 buah akan dibagikan ke kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan pemerintah daerah Indragiri Hulu. Masing-masing kantor mendapat 3 buah kuesioner yang ditujukan kepada Kepala OPD, Kepala Bagian Keuangan, dan Bendahara Pengeluaran OPD.

## **Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (y)**

Akuntabilitas keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut (Aliyah dan Nahar: 2012).

Dalam instrumen ini pengukuran ini menggunakan skala likert dengan skor 1 sampai 5. Masing-masing variabel diukur dengan model likert skor lima poin, yaitu: (1) sangat tidak setuju (STS), (2) tidak setuju (TS), (3) ragu-ragu (RR), (4) menunjukkan setuju (S) dan skor (5) sangat setuju (SS). Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuan terhadap pernyataan diajukan sesuai dengan kondisi mereka.

## **Penyajian Laporan Keuangan (X1)**

Penyajian laporan keuangan adalah penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan Yadiati (2007:63). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas

pelaporan selama satu periode pelaporan (PP No. 71 Tahun 2010).

Indikator penyajian laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 yaitu andal, relevan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan (PP No.71 Tahun 2010). Dalam instrumen ini pengukuran ini menggunakan skala likert dengan skor 1 sampai 5. Masing-masing variabel diukur dengan model likert skor lima poin, yaitu: (1) sangat tidak setuju (STS), (2) tidak setuju (TS), (3) ragu-ragu (RR), (4) menunjukkan setuju (S) dan skor (5) sangat setuju (SS). Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuan terhadap pernyataan diajukan sesuai dengan kondisi mereka .

#### **Aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2)**

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Rohman, 2009). Aksesibilitas dalam laporan keuangan adalah sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006).

Variabel aksesibilitas diukur dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) melalui media massa (Permendagri No. 13 Tahun 2006) dan indikatornya adalah keterbukaan, kemudahan, dan accesible. Variabel aksesibilitas laporan keuangan ini diukur dengan instrumen pernyataan penelitian dari Sande (2013) yang terdiri dari 3(tiga) pernyataan.

Dalam instrumen pengukuran ini menggunakan skala likert dengan skor 1 sampai 5. Masing-masing variabel diukur dengan model likert skor lima poin, yaitu: (1) sangat tidak setuju (STS), (2) tidak setuju (TS), (3) ragu-ragu (RR), (4) menunjukkan setuju (S) dan skor (5) sangat setuju (SS).

#### **Sistem pengendalian intern pemerintah**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 2 menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan “suatu sistem yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah”.

Adapun indikator dari sistem pengendalian intern pemerintah ini adalah: (1) lingkungan pengendalian, (2) penilai resiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan (PP Nomor 60 Tahun 2008). Variabel aksesibilitas laporan keuangan ini diukur dengan instrumen pernyataan penelitian Zalni (2013) yang terdiri dari 15(Lima Belas) pernyataan.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Populasi dari penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimana teknik pengambilan sampel atas responden menggunakan teknik *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampling berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik dijadikan sampel penelitian.

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala OPD, Kasubag Keuangan, dan Bendahara Pengeluaran pada 25 OPD Kabupaten Indragiri Hulu. Maka jumlah responden pada penelitian ini adalah 75 orang, yaitu 23 OPD Kabupaten Indragiri Hulu dikalikan 3 orang yang menjadi responden disetiap OPD.

### Statistik Deskriptif Variabel

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disajikan dalam tabel statistik deskriptif yang menunjukkan angka minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1**  
**Descriptive Statistics**

|                       | N  | Mini<br>mum | Maxi<br>mum | Mean | Std.<br>Deviation |
|-----------------------|----|-------------|-------------|------|-------------------|
| PLK                   | 63 | 22          | 38          | 30.5 | 4.6451            |
| ALK                   | 63 | 7           | 14          | 11.5 | 2.1543            |
| SPIP                  | 63 | 40          | 71          | 56.6 | 6.9853            |
| APKD                  | 63 | 22          | 22          | 31.3 | 4.4685            |
| Valid N<br>(listwise) | 63 |             |             |      |                   |

Sumber : Data Olahan, 2017

### Uji Kualitas Data

#### Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidak suatu

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011:52). Pengujian validitas ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel untuk degree of freedom ( $df$ ) =  $n - 2$  dengan  $\alpha$  0,05, dalam hal ini  $n$  adalah jumlah sampel (Ghozali, 2011:53).

### Uji Reliabilitas

*Reliabilitas* adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji *reliabilitas* ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan (Ghozali, 2013:47).

Untuk mengukur reliabilitas dilakukan dengan uji *statistic Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka semakin baik. Secara umum, keandalan kurang dari 0,6 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,7 bisa diterima, dan lebih dari 0,8 adalah baik (Sekaran, 2006:182). Jadi, apabila suatu variable menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* > 0,6 maka variabel tersebut reliabel.

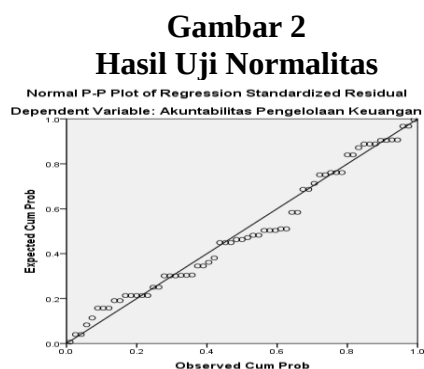
**Tabel 2**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

| Variabel | Cronbach alpha | Total Cronbach alpha | Keterangan |
|----------|----------------|----------------------|------------|
| PLK      | 0,60           | 0.923                | Reliabel   |
| ALK      | 0,60           | 0.846                | Reliabel   |
| SPIP     | 0,60           | 0.884                | Reliabel   |
| APKD     | 0,60           | 0.903                | Reliabel   |

Sumber: Data Olahan, 2017

### Hasil Uji Asumsi Klasik Hasil Uji Normalitas Data

Dengan menggunakan normal *P-P Plot* data yang ditunjukkan menyebar di sekitar garis diagonal, maka model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2011: 34). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : Data Olahan, 2017

Berdasarkan gambar 2 diatas dapat dilihat penyebaran titik-titik di sekitar garis diagonal, dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat diartikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

### Hasil Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*) atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Pengujian multikolonieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai *inflation factor*

(VIF). Adanya multikolonieritas dapat diketahui jika nilai VIF > 10. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Multikolinieritas Data**

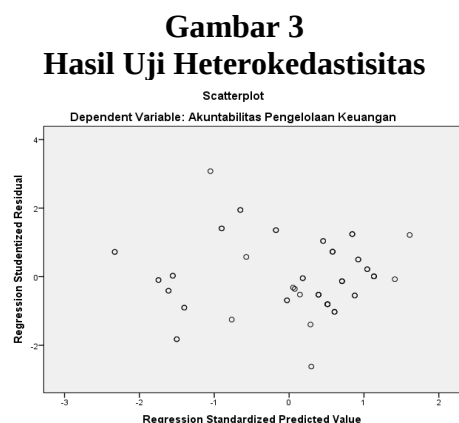
| Model        | Collinearity Statistics |       |
|--------------|-------------------------|-------|
|              | Tolerance               | VIF   |
| 1 (Constant) |                         |       |
| PLK          | .401                    | 2.492 |
| ALK          | .495                    | 2.020 |
| SPIP         | .449                    | 2.227 |

Sumber : Data Olahan, 2017

Berdasarkan Tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa nilai VIF seluruh variabel < 10 dan tolerance > 0,10. Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa tidak ada multikolonieritas dalam model regresi.

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat grafik Plot (*Scatterplot*).



Sumber : Data Olahan, 2017

Berdasarkan Gambar 3 diatas dapat dilihat *Scatterplot* tidak membentuk pola tertentu

(menyebar). Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas dalam model regresi.

### Hasil Uji Autokorelasi

Untuk menguji Autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Waston (DW), yaitu jika nilai DW terletak antara  $du$  dan  $(4 - dU)$  atau  $du \leq DW \leq (4 - dU)$ , berarti bebas dari Autokorelasi. Jika nilai DW lebih kecil dari  $dL$  atau DW lebih besar dari  $(4 - dL)$  berarti terdapat Autokorelasi. Nilai  $dL$  dan  $dU$  dapat dilihat pada tabel Durbin Waston, yaitu nilai  $dL$  ;  $dU = \alpha$  ;  $n$  ;  $(k - 1)$ . Keterangan :  $n$  adalah jumlah sampel,  $k$  adalah jumlah variabel, dan  $\alpha$  adalah taraf signifikan.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | .919 <sup>a</sup> | .844     | .836              | 1.801                      | 2.026         |

**Sumber : Data Olahan, 2017**

Pada tabel 4 terlihat bahwa nilai Durbin-Watson model adalah 2.026. Dari tabel Durbin Watson dengan  $\alpha = 5\%$  ;  $n = 63$  ;  $(k - 1)$  didapatkan nilai  $dU$  1,693. Dari nilai tersebut diketahui bahwa  $4 - dU = 4 - 1,693 = 2,307$ . dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa nilai Drubin Watson 2.026 lebih besar dari 1,693 dan lebih kecil dari 2,307. Artinya tidak Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara *linear* antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) dengan terjadi masalah autokorelasi pada model yang dibangun.

### Metode Analisis Data

#### Metode Regresi Linear berganda

Variabel dependen (Y).  
Persamaan regresi linier bergandayaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan :

- a = Konstanta
- b = Koefisien Regresi Parsial
- e = Variabel Pengganggu (Error)
- X1 = Penyajian Laporan Keuangan
- X2 = Aksesibilitas Laporan Keuangan
- X3 = SPIP
- Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

**H<sub>1</sub> : Penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah**

Berdasarkan uji regresi, diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5.523 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2.001. dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai  $\alpha$  0.05, maka  $H_0$  ada di daerah penolakan, berarti hasil penelitian ini menunjukkan hipotesis pertama diterima artinya aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sande (2013), Tamara (2015), Nanda (2016) yang mengatakan bahwa penyajian laporan keuangan mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan Nasution (2009) menunjukkan hasil yang berbeda, penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ketidak konsistenan penelitian ini dengan penelitian Nasution (2009) dapat disebabkan hasil jawaban responden yang berbeda.

## **H2: Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah**

Berdasarkan uji regresi diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3.263 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2.001. dengan nilai signifikansi sebesar  $0,002 < 0,05$ . Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai  $\alpha$  0.05, maka  $H_0$  ada di daerah penolakan, berarti hasil penelitian ini menunjukkan hipotesis kedua diterima artinya aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sande (2013), Tamara (2015), Nanda (2016) yang mengatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Nasution (2009) yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## **H3 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah**

Berdasarkan uji regresi diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4.462 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2.001. dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai  $\alpha$  0.05, maka  $H_0$  ada di daerah penolakan, berarti hasil penelitian ini menunjukkan hipotesis ketiga diterima artinya sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Iclas, Dkk (2014), tamara (2015), dan kartika (2015) yang mengatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan keuangan pemerintah daerah. Tetapi bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indriya (2013) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Ketidak konsistenan penelitian ini dengan penelitian Indriya (2013) dapat disebabkan karena hasil jawaban responden yang berbeda.

## **Hasil Analisis Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* terletak antara 0 sampai dengan 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika dalam proses mendapatkan nilai *Adjusted*

$R^2$  yang tinggi adalah baik, tetapi jika nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* rendah tidak berarti model regresi jelek (Ghozali, 2009:15). Nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.

**Tabel 5**  
**Hasil Analisis Koefisien**  
**Determinasi**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | .919 <sup>a</sup> | .844     | .836              | 1.801                      | 2.026         |

Sumber : Data Olahan, 2017

Hasil perhitungan analisis regresi pada tabel 5 diperoleh *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0.836. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah dapat menjelaskan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 83,6%. Sedangkan sisanya 16,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak teramati dalam model penelitian ini.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya maka menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut: 1). penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu. 2). aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu. 3). sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas maka peneliti menyarankan agar setiap OPD yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui penyajian laporan keuangan, memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dan pengguna informasi laporan keuangan serta dengan meningkatkan sistem pengendalian intern pemerintah. Serta untuk kedepannya agar pimpinan OPD melakukan pembahaasan atau sosialisasi dengan para staff bagian keuangan tentang pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aliyah, Siti dan Nahar, Aida. 2012. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara*. jurnanal akuntansi dan auditing.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisa Multivariate Dengan*

- Program SPSS. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan keuangan Daerah*. Yoyakarta: UPP STIM YKPN.
- Handri, Yukia Purnama, Dandes Rifa, Novia Rahmawati. 2012. *Pengaruh Penyajian Laporan Posisi Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sitem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD (penelitian pada SKPD di Pemerintah Kota Padang)*. <http://ejurnal.bunghatta.ac.id>.
- Ichlas, Muhammad DKK. 2014. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh*. Jurnal Magister Akuntansi ISSN 2302-0164.
- Iskandar, Joni. 2015. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)*. Skripsi. Universitas Riau.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mulyana, Budi. 2006. *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Akuntansi Pemerintah.
- Nasution, Saufi Iqbal. 2009. *pengaruh penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD di pemerintah Sumatera Utara*. Skripsi. USU.
- Nanda, Lestari Putri. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada SKPD Kabupaten Pelalawan*. Skripsi. Universitas Riau.
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat: Jakarta.
- Nurhayani, hani. 2013. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandung*. Jurnal Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

Primayani, Putu Riana. 2014. *Pengaruh Pengendalian Internal, Value For Money, Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada SKPD di Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung*. Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha.